

## ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) UNTUK PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN PROBOLINGGO

### *ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SUPPLEMENTARY FEEDING PROGRAMS FOR STUNTING PREVENTION IN PROBOLINGGO REGENCY*

Sherli IndahFeby Triuspita<sup>1\*</sup>, IradhadTaqwa Sihidi<sup>2\*</sup>

<sup>12</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang  
e-mail: sherliiftp@gmail.com\*

Diserahkan: 13/01/2024; Diperbaiki: 26/02/2024; Disetujui: 02/04/2024

DOI: 10.47441/jkp.v19i1.358

#### Abstrak

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah dengan angka stunting tertinggi di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai upaya penanggulangan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kebijakan dan kelompok sasaran, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PMT telah terbukti efektif. Ditemukan kenaikan berat badan sebesar 0,95 kg dan peningkatan tinggi badan sebesar 2,64 cm pada penerima PMT sejak program ini diterapkan, yang menandakan peningkatan status gizi mereka. Selain itu, jumlah kasus stunting juga mengalami penurunan sebanyak 2.500 anak setelah implementasi program ini. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam hal kepatuhan kelompok sasaran di mana ada beberapa target yang tidak mengikuti secara penuh program PMT ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar sektor atau dinas terkait untuk mencegah tumpang tindih sasaran pemberian PMT, meningkatkan efisiensi program, dan memberikan dampak yang lebih signifikan, termasuk penyesuaian program dan pemetaan sasaran.

**KataKunci:** Implementasi, Pemberian Makanan Tambahan, Stunting

#### Abstract

*Probolinggo Regency is one of the areas with the highest stunting rate in East Java. This study aims to analyze the implementation of the Supplementary Feeding Program (PMT) to reduce stunting in the Probolinggo District Government. This study used a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews with policymakers and target groups, as well as the analysis of relevant documents. The results showed that the implementation of the Supplementary Feeding Program (PMT) has proven effective. There has been a weight gain of 0.95 kg and a height gain of 2.64 cm in PMT recipients since the program was implemented. This indicates the success of the program in improving the nutritional status of children in Probolinggo District. In addition, there was a decrease in the number of stunting cases by 2500 children after the implementation of this program. However, there are a few obstacles, for example, in terms of the compliance of the target group, where there are some targets who still need to participate in this program fully. Improved coordination between related sectors or agencies is needed to prevent overlapping PMT targets, improve program efficiency, and provide a more significant impact, including program alignment and target mapping.*

**Keywords:** Implementation, Supplementary Feeding Program, Stunting.

## PENDAHULUAN

Stunting adalah kondisi yang ditandai oleh ketidakmampuan anak balita untuk mencapai pertumbuhan fisik dan perkembangan yang optimal (Ruel-Bergeron *et al.* 2019). Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terutama kekurangan gizi kronis yang berlangsung secara berkelanjutan. Stunting paling umum terjadi selama periode kritis yaitu 1.000 hari pertama kehidupan anak, hingga berusia dua tahun (Mugode *et al.* 2018; Mediani *et al.* 2022; Marais *et al.* n.d.; Ali 2021; Khan, Hossain, and Awan 2022). Dalam periode krusial ini, pertumbuhan dan perkembangan anak sangat rentan terhadap dampak kekurangan gizi dan hasilnya dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan fisik, kecerdasan, serta produktivitas anak tersebut saat dewasa nanti (Kemenkes 2020). Stunting juga merupakan kondisi di mana kesehatan gizi anak tidak mencukupi dalam hal tinggi atau panjang tubuh dibandingkan dengan usianya (Ginting, Kitreerawutiwong, and Mekrungrongwong 2023; Afandi *et al.* 2023; Hartarto *et al.* 2023; Dhami *et al.* 2019; Minh Do, Lissner, and Ascher 2018; Scarpello 2020; Tomsa and Bax 2023; Utami and Cramer 2020; Magnusdottir 2023; Herbert 2024; Pellizzoni 2021; Rana 2023; Waldman 2022; Bloomfield and Steward 2020; DuPuis and Greenberg 2019; Nirmalasari 2020). Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Indonesia, mayoritas kasus stunting di Indonesia ditemukan pada anak rentang usia 24-35 bulan dengan persentase 26,2% (Kemenkes 2021).

Penanggulangan stunting sangat erat kaitannya dengan strategi pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan berdaya guna (Muhartini 2017; Indriyati *et al.* 2020; Latifa 2018). Upaya untuk menciptakan SDM yang berkualitas diawali dengan pengelolaan tumbuh kembang anak, dimulai dengan gizi dan pendidikan yang tepat di lingkungan keluarga (Probohastuti and Rengga 2019). Pada tingkat masyarakat faktor-faktor seperti, sanitasi, keamanan keluarga, pengasuhan anak dan pola pelayanan kesehatan dasar penting dalam membangun ketahanan anak terhadap malnutrisi (Nur Azizah, Nastia 2022; Maliani *et al.* 2021). Pada tingkat makro, diperlukan kebijakan, strategi, regulasi, dan koordinasi pemerintah. Hal ini untuk memastikan bahwa poin-poin penting seperti pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan dapat terwujud, serta pendidikan tidak langsung yang mengubah budaya dan pola asuh keluarga yang buruk serta pemenuhan gizi keluarga termasuk dengan anak-anak (Normasia, Mahsyar, and Sudarmi 2020).

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Stunting 2020-2024 merupakan rencana aksi nasional yang disusun oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi stunting di Indonesia. Aksi ini bertujuan untuk terus memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk menurunkan angka stunting sebesar 24% pada akhir tahun 2021, turun menjadi 14% pada tahun 2024. Tujuan dari Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) adalah untuk mendorong partisipasi dan peran aktif pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program inovatif dalam penanggulangan stunting. Pada tahun 2018, 100 kabupaten/kota telah dijadikan prioritas dalam program ini, yang kemudian diikuti dengan penambahan 160 kabupaten/kota pada tahun 2019. Pada tahun 2024, program Stranas Stunting akan diperluas hingga mencakup seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia (TNP2KRI 2017).

Prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Menurut data hasil Survei Status Gizi Balita Terintegrasi (SSGBI) yang dilakukan oleh Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia, pada tahun 2021 indikator TB/U menunjukkan bahwa prevalensi stunting di seluruh Indonesia mencapai 24,4%, dan menurun menjadi 21,6% pada tahun 2022. Meskipun angka stunting menurun setiap tahunnya, angka tersebut masih tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh WHO, yaitu batas maksimal toleransi di angka 20%, dan dengan target nasional tahun 2024 yaitu 14% (Kemenkes 2021).

Menurut laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Provinsi Jawa Timur mempunyai tingkat prevalensi stunting cukup tinggi yakni sebesar 19,2%, yang hanya sedikit di bawah standar WHO yaitu 20% (Kemenkes 2021). Salah satu kabupaten yang memiliki tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi di Jawa Timur yaitu Kabupaten Probolinggo (14,87%), lebih tinggi 5,17% dibandingkan dengan Kota Madiun yang memiliki tingkat prevalensi stunting hanya sebesar 9,7%. Hal ini yang menjadikan Kabupaten Probolinggo termasuk kabupaten/kota prioritas penanggulangan stunting di Jawa Timur.

Data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) menyebutkan angka stunting di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2022 yaitu sebanyak 11.695 balita (14,87%) menjadi 9.132 balita (12,97%) pada tahun 2023. Angka ini memang menurun namun masih tergolong tinggi. Berdasarkan tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Probolinggo dibandingkan beberapa lokasi lain di Jawa Timur, menjadi dasar peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penanggulangan stunting di Kabupaten Probolinggo. Alasan utamanya adalah perlunya fokus penanganan pada tingkat lokal untuk memberikan dampak konkret. Kabupaten Probolinggo menjadi pilihan strategis untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab tingginya angka stunting, memahami konteks geografis dan sosial yang khas, serta merancang solusi yang spesifik dan relevan bagi masyarakat setempat.

Dinas kesehatan kabupaten memegang tanggung jawab kunci di sektor kesehatan, yang merupakan faktor penting untuk mengakselerasi pencegahan stunting di tingkat kabupaten (Permatasari *and* Walinegoro 2023). Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo telah melakukan koordinasi dan pelaksanaan program kesehatan, termasuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT). PMT adalah program pemberian makanan tambahan yang berasal dari inisiatif pemerintah pusat, diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Stunting 2020-2024. Program ini kemudian dilanjutkan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah sebagai langkah konkret dalam menanggulangi masalah gizi, terutama stunting di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program PMT dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Probolinggo. Analisis implementasi dilakukan dengan merujuk pada teori *Grindle* yang menilai implementasi kebijakan dari empat aspek utama yaitu, perumusan kebijakan, organisasi pelaksana, lingkungan kebijakan, dan kelompok sasaran.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Responden dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yang melibatkan staf dari Subbag Perencanaan dan Bidang Kesehatan Masyarakat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, organisasi pelaksana, lingkungan kebijakan, dan kelompok sasaran. Data dokumentasi diperoleh dari berbagai dokumen seperti Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Rencana Kerja Tahunan tahun 2023, data penerima PMT, Probolinggo dalam Angka, Populasi Penduduk BPS, Monitoring dan Evaluasi Intervensi PMT Gizi Kurang, Rencana Kontinjensi Kesehatan Masyarakat 2023, Pilot *Project* PMT, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kabupaten Probolinggo. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Probolinggo dari Perspektif Implementasi Kebijakan

Program penanggulangan stunting bukanlah sekedar inisiatif biasa, melainkan sebuah respon kritis dari pemerintah untuk menangani masalah serius yang telah dialami masyarakat. Stunting sebuah fenomena yang merujuk pada pertumbuhan fisik dan perkembangan anak yang terhambat akibat kurang gizi pada masa awal kehidupan mereka, telah menjadi tantangan global yang menuntut perhatian serius. Indonesia, sebagai salah satu negara yang turut terkena dampak, tidak dapat menyepelekan urgensi penanganan stunting. Penting adanya kesadaran bahwa penanggulangan stunting tidak dapat dianggap sebelah mata, karena dampaknya akan terus dirasakan oleh penderita di masa depan. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dan terkoordinasi dalam program penanggulangan stunting menjadi kunci untuk memberikan dampak positif yang nyata pada kesejahteraan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Dampak stunting sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan. Diantaranya adalah masalah kesehatan, seperti rentan terhadap infeksi, serta masalah perkembangan kognitif dan sosial. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan belajar yang terhambat dan sulit beradaptasi dengan baik di lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, program penanggulangan stunting menjadi penting dalam menghindari konsekuensi jangka panjang ini.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, pada tahun 2022 prevalensi stunting sebesar 14,87% (11.695 balita stunting), kemudian pada tahun 2023 menjadi 12,97% (9.132 balita stunting). Meskipun ada penurunan, namun stunting di Kabupaten Probolinggo masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah stunting masih perlu menjadi perhatian serius. Analisis data ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi stunting. Faktor-faktor penyebab stunting, seperti asupan gizi yang kurang tercukupi. Selain itu, upaya preventif dan intervensi perlu ditingkatkan untuk mengurangi tingkat stunting lebih lanjut dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Probolinggo.

Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menyatakan bahwa yang menjadi penyebab utama stunting adalah *intake* makanan dan infeksi. Pada dasarnya, permasalahan gizi dapat disederhanakan menjadi dua faktor utama yang mendasarinya yaitu asupan makanan yang mencukupi dan terhindar dari infeksi. Namun, hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat faktor-faktor tambahan yang turut berperan dalam mempengaruhi status gizi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satunya adalah pengetahuan yang masih rendah terkait dengan pentingnya konsumsi gizi yang baik. Selain itu, preferensi makanan instan juga menjadi kendala dalam mencapai status gizi yang optimal. Di lapangan dan di posyandu, telah diidentifikasi berbagai masalah terkait asupan makanan. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait gizi yang baik menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan gizi ini.

Di Kabupaten Probolinggo terjadi penurunan stunting sekitar 1,9% dari tahun 2022 sampai 2023. Meskipun terjadi penurunan, upaya lebih lanjut tetap diperlukan untuk mengatasi permasalahan stunting di wilayah ini. Dengan demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menilai bahwa penurunan persentase stunting sebesar 1,9% mewakili perkembangan positif dalam penanggulangan masalah gizi balita, meskipun dalam angka absolutnya jumlah anak yang terkena stunting masih tinggi. Penyebabnya adalah sifat jangka panjang dari masalah stunting, yang memerlukan upaya berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk mencapai perubahan yang signifikan. Upaya yang dilakukan untuk menangani dan mencegah masalah stunting ini yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

Penanggulangan Stunting 2020-2024. Perpres ini merupakan rencana aksi nasional yang disusun oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi stunting di Indonesia. Rencana aksi ini meliputi pemberian makanan tambahan pada anak.

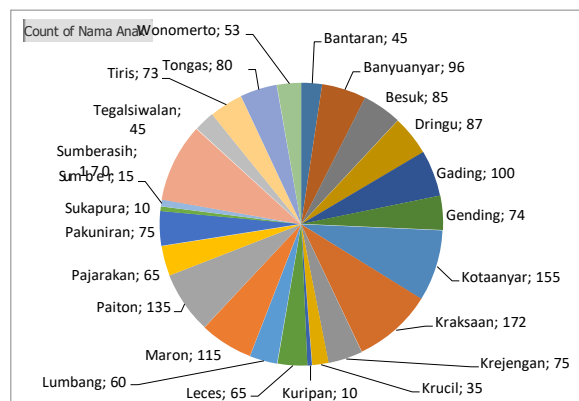
**Penanggulangan Stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Melalui Program PMT dari Perspektif Kebijakan**

PMT tidak hanya sekedar tindakan, tetapi juga sebuah strategi proaktif dalam mengatasi stunting, sebuah masalah gizi kronis yang memberikan dampak serius terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dalam menghadapi tantangan stunting, program PMT dirancang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Stunting 2020-2024 dengan tujuan utama yaitu memberikan tambahan nutrisi kepada balita yang berisiko mengalami atau bahkan sudah mengalami stunting. Sebagai suatu inisiatif yang holistik, PMT tidak hanya mengejar pemulihan kondisi gizi, tetapi juga berupaya mencegah lebih lanjut penurunan status kesehatan anak-anak di masa depan. Dengan fokus pada upaya pencegahan dan perbaikan, program PMT menjadi pangkal usaha yang berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan dan masa depan generasi penerus.

Program PMT dilaksanakan selama periode 90 hari. Program PMT yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo diberikan dengan beragam menu dalam 1 minggu. Selama 6 hari anak diberikan kudapan seperti lempeng ayam, kroket tempe bayam, dan variasi lainnya, selanjutnya pada hari ketujuh diberikan makanan utama. Menu utama yang disediakan antara lain nasi sop yang disajikan dengan pentol, sosis, dan ayam goreng.

Perubahan yang positif terlihat dari data penurunan kasus stunting di Kabupaten Probolinggo, di mana jumlah anak penderita stunting turun dari 12.089 anak pada tahun 2022 menjadi 11.695 anak pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan program penanggulangan stunting melalui kebijakan pemberian PMT. Langkah-langkah kebijakan yang diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di wilayah tersebut. Dengan menjaga dan terus meningkatkan keberhasilan kebijakan yang telah terbukti efektif, Kabupaten Probolinggo dapat melanjutkan progres positifnya dalam menangani masalah stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di daerah tersebut.

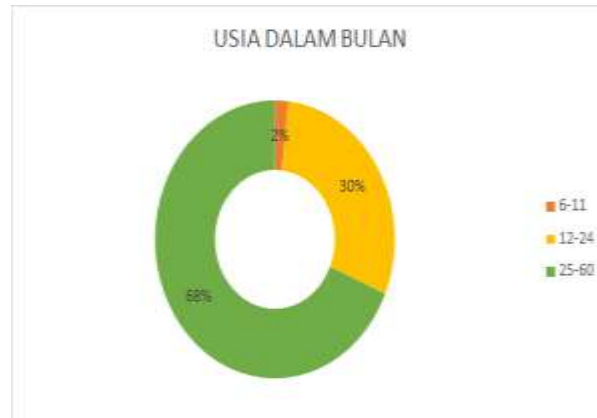
Data mengenai penerima program PMT di Kabupaten Probolinggo telah dikelompokkan berdasarkan kecamatan, dengan total 24 kecamatan di kabupaten tersebut.



**Gambar 1. Jumlah Penerima PMT di Kabupaten Probolinggo Menurut Kecamatan**  
*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo, 2023*

Data partisipasi program PMT di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 yang mencapai total 1.895 penerima, menjadi relevan ketika dikaitkan dengan jumlah penderita

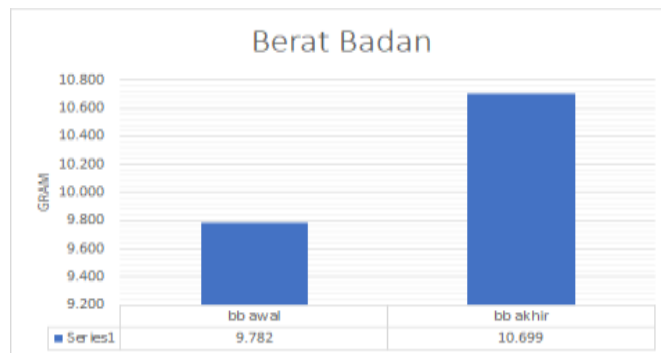
stunting yang mencapai 11.695 anak pada tahun yang sama. Analisis menunjukkan bahwa ketidakmerataan partisipasi program PMT di beberapa kecamatan dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap jumlah penderita stunting yang tinggi di Kabupaten Probolinggo. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi PMT, termasuk peninjauan kembali kebijakan distribusi dan peningkatan sumber daya organisasi pelaksana. Upaya kolaboratif antara pihak terkait, penyelenggara program, dan pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan cakupan program dan mengurangi jumlah penderita stunting di Kabupaten Probolinggo.



**Gambar 2. Jumlah Balita Penerima PMT Menurut Usia di Kabupaten Probolinggo Tahun 2023**

*Sumber: Rakontek Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo, 2023*

Analisis data menunjukkan bahwa sebanyak 68% dari total balita berada dalam rentang usia 25-60 bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok usia ini memiliki kontribusi paling signifikan terhadap jumlah balita secara keseluruhan. Fokus pada rentang usia ini dapat menjadi penting dalam perumusan kebijakan dan program intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak-anak dalam masyarakat.

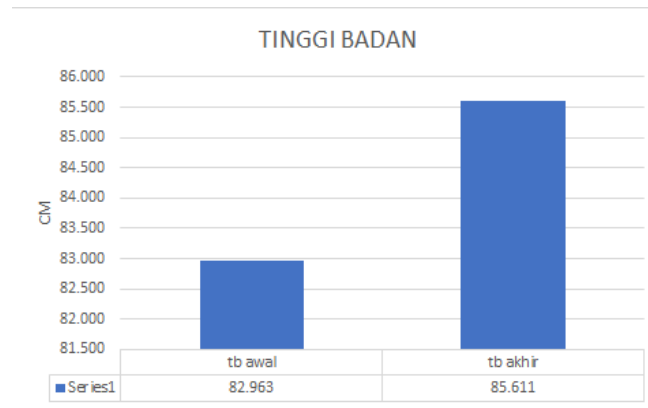


**Gambar 3. Peningkatan Rata-Rata Berat Badan Penerima PMT di Kabupaten Probolinggo Tahun 2023**

*Sumber: Rakontek Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo 2023*

Pasca pelaksanaan program PMT, tercatat peningkatan rata-rata berat badan sebesar 0,95 kilogram. Untuk mendalami dampak program ini, dilakukan analisis lanjutan dengan menggunakan uji statistik guna mengevaluasi perbedaan berat badan balita sasaran PMT sebelum dan setelah implementasi program. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata berat badan sebelum dan setelah program PMT berlangsung. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata berat badan awal

sebelum dan setelah pelaksanaan program PMT memiliki signifikansi yang tinggi ( $p=0,00$ ). Temuan ini memberikan indikasi kuat bahwa program PMT berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan berat badan balita, memberikan landasan kuat untuk terus menerapkan dan mengembangkan program tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya penilaian mendalam menggunakan metode statistik untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program-program kesehatan seperti PMT.



**Gambar 4. Peningkatan Rata-Rata Tinggi Badan Penerima PMT di Kabupaten Probolinggo Tahun 2023**

*Sumber: Rakontek Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo 2023*

Temuan dari hasil wawancara dan analisis data terkait dengan balita dan dampak program PMT. *Pertama*, analisis data pada kelompok usia 25-60 bulan menunjukkan bahwa sekitar 68% dari total balita berada dalam rentang usia ini, menekankan kontribusi yang signifikan dari kelompok usia tersebut terhadap jumlah keseluruhan balita. Implikasinya adalah perlunya fokus khusus dalam perumusan kebijakan dan program intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak-anak dalam masyarakat. *Kedua*, hasil pelaksanaan program PMT menunjukkan peningkatan rata-rata tinggi badan balita sebesar 2,64 cm. Analisis statistik menunjukkan bahwa perbedaan tinggi badan tersebut memiliki signifikansi statistik yang tinggi, menandakan bahwa perubahan tersebut bukanlah kebetulan belaka. Hasil analisis lanjutan untuk mengukur perbedaan tinggi badan pada balita sasaran PMT menggunakan uji statistik menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tinggi badan awal sebelum dan setelah pelaksanaan program PMT memiliki tingkat signifikansi yang tinggi ( $p=0,00$ ). Temuan ini memberikan bukti kuat terkait efektivitas program PMT dalam meningkatkan kondisi kesehatan balita, khususnya pada aspek pertumbuhan tinggi badan. Kesimpulannya adalah bahwa analisis data dan evaluasi dampak program memberikan landasan yang kuat untuk mendukung kebijakan dan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan balita dalam masyarakat.

Upaya penanggulangan stunting juga perlu lebih difokuskan pada ibu hamil sebagai strategi utama. Memberikan perhatian yang lebih masif, termasuk pemberian makanan tambahan seperti vitamin kepada ibu hamil, menjadi langkah krusial dalam memastikan kondisi kesehatan dan gizi yang optimal untuk pertumbuhan janin. Dengan memprioritaskan ibu hamil, program penanggulangan stunting dapat mengurangi risiko kelahiran bayi dengan berat badan rendah dan menanggapi kebutuhan gizi yang kritis selama periode kehamilan. Pendekatan ini memastikan bahwa fondasi kesehatan anak-anak dimulai sejak awal kehidupan mereka, dengan memberikan dukungan khusus kepada ibu hamil sebagai agen kunci dalam pencegahan stunting (Wawancara dengan Safiudin, A.Md, Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo).

## Penanggulangan Stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo melalui Program PMT dari Perspektif Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana, melalui pemberian kewenangan dan alokasi sumber daya yang memadai, mampu memberikan dukungan optimal dalam proses implementasi kebijakan dan penyelenggaraan layanan publik. Keberadaan kewenangan dan sumber daya yang memadai ini bukan hanya sekadar elemen administratif, melainkan elemen kritis yang memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat berlangsung dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi, didorong oleh kemampuan organisasi pelaksana untuk mengambil tindakan konkret secara tepat waktu.

Kewenangan dan sumber daya yang memadai bukan hanya menjadi sarana administratif semata, melainkan fondasi yang memastikan peran vital organisasi pelaksana dalam memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Rachmawati, Nurjaman, and Sihidi 2022). Merujuk pada hal tersebut, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. *Pertama*, yaitu sumber daya organisasi pelaksana. Bagaimana organisasi pelaksana, yaitu dinas kesehatan memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup memadai untuk mendukung implementasi kebijakan dengan efektif. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menyatakan bahwa terdapat permasalahan terkait ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya di bidang gizi, menunjukkan bahwa upaya penanggulangan stunting masih dihadapkan pada kendala pelaksanaan di lapangan. Kekurangan personil dalam implementasi program gizi dapat menghambat efektivitas intervensi dan menyulitkan pencapaian tujuan kesehatan. Selain itu, kekosongan di beberapa bagian pelaksanaan, terutama di puskesmas, memperparah tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata. Pentingnya mendapatkan perhatian lebih lanjut terkait kebutuhan tenaga kesehatan yang harus diisi, khususnya di puskesmas, menandakan perlunya tindakan strategis dan dukungan lebih lanjut dari pihak terkait, seperti Bappeda atau BKD. Dengan mengatasi permasalahan ini, diharapkan program penanggulangan stunting dapat berjalan lebih efektif, memberikan dampak positif yang lebih besar pada kesehatan anak dan ibu di Kabupaten Probolinggo. Diperlukan langkah-langkah konkret, seperti pengembangan kebijakan untuk mendukung perekrutan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, guna memastikan pelaksanaan program berjalan secara optimal.

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah lokasi khusus penanggulangan stunting. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo mencapai 10 M. Jumlah ini mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Probolinggo melalui program PMT. Anggaran yang signifikan tersebut menunjukkan prioritas yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah gizi dan kesehatan anak-anak, serta menegaskan komitmen untuk mencapai hasil yang maksimal dalam program tersebut. Diharapkan dengan dukungan anggaran yang memadai, program PMT dapat terus ditingkatkan efektivitasnya dan memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan anak-anak di wilayah tersebut. Keputusan untuk mengalokasikan dana sebesar ini memberikan perhatian khusus pada masalah gizi dan pertumbuhan anak-anak di wilayah tersebut. Meskipun anggaran dianggap tinggi, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaannya. Diperlukan pemantauan yang cermat terhadap bagaimana dana tersebut digunakan, apakah sesuai dengan tujuan program dan apakah telah memberikan dampak positif yang diharapkan. Selain itu, perbandingan dengan kebutuhan riil di lapangan dan potensi peningkatan kolaborasi antar lembaga juga merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan program dan maksimalnya dampak positif yang dihasilkan.

*Kedua*, yaitu tantangan organisasi pelaksana. Dalam proses pelaksanaan kebijakan tentu terdapat tantangan utama dari organisasi pelaksana terkait upaya dinas kesehatan untuk mendukung implementasi kebijakan dengan efektif. Salah satu permasalahan yang



timbul dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting adalah ketidakselarasan persepsi, yang dapat mengakibatkan tumpang tindih yang merugikan efektivitas kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha yang lebih serius dan terstruktur untuk menyelaraskan persepsi di antara para pelaksana program dan stakeholder terkait guna mencegah terjadinya tumpang tindih yang tidak diinginkan. Sebagai contoh konkret, diperlukan pertimbangan yang matang terkait variasi menu dalam PMT, dengan mempertimbangkan jenis bantuan yang disediakan oleh masing-masing dinas yang terlibat. Sebagai ilustrasi, apakah bantuan yang diberikan oleh dinas kesehatan dan dinas perikanan memiliki cakupan PMT yang serupa, sebagaimana dicontohkan oleh program PMT berupa ikan. Dengan merinci dan mempertimbangkan dengan seksama setiap elemen program, diharapkan dapat menciptakan kejelasan dan harmonisasi dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting, mengoptimalkan pencapaian tujuan, dan mencegah terjadinya tumpang tindih yang dapat menghambat efektivitas upaya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ada upaya koordinasi antar sektor untuk mencegah terjadinya tumpang tindih terkait program PMT. Pentingnya koordinasi antar dinas menjadi krusial dalam mencegah terjadinya kesamaan sasaran dalam suatu program atau kebijakan. Koordinasi tersebut menjadi fondasi untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah, seperti optimalisasi sumber daya, pencegahan tumpang tindih penyesuaian strategi, peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas dalam pencapaian tujuan dan dukungan kesinambungan program.

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan program PMT, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo perlu melakukan upaya yang lebih serius dalam penyelarasan peran dan tanggung jawab antar dinas terlibat. Koordinasi yang baik dan pembagian kerja yang jelas akan memastikan bahwa setiap dinas dapat memberikan kontribusi secara maksimal sesuai dengan spesifikasi tugasnya. Hanya dengan implementasi yang tepat dari pembagian kerja ini, program PMT dapat mencapai tingkat keseluruhan yang diinginkan, memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat yang menjadi sasaran.

### **Penanggulangan Stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo melalui Program PMT dari Perspektif Lingkungan Kebijakan**

Karakteristik lingkungan kebijakan muncul sebagai faktor mengidentifikasi karakteristik lingkungan kebijakan yang spesifik menjadi esensial dalam strategi perencanaan dan implementasi kebijakan yang berhasil. Dalam hal ini, analisis risiko dan peluang di lingkungan kebijakan dapat membantu pihak pelaksana mengantisipasi kendala potensial dan merancang langkah-langkah mitigasi yang diperlukan (Rachmawati, Nurjaman, and Sihidi 2022). Selain itu, membangun jejaring dan kerjasama yang kuat dengan pemangku kepentingan di sekitarnya adalah langkah proaktif untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif. Ketika mencapai kesuksesan dalam implementasi kebijakan menjadi tujuan utama, memahami sifat lingkungan kebijakan dan berupaya menciptakan kondisi yang mendukung adalah langkah-langkah strategis yang tak dapat dihindari. Kesinambungan dalam evaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan juga menjadi kunci untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan dalam jangka panjang (Rachmawati, Nurjaman, and Sihidi 2022).

Dalam konteks lingkungan kebijakan terdapat dua hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, lingkungan kebijakan positif, yaitu bagaimana organisasi pelaksana menciptakan lingkungan kebijakan yang positif. Secara keseluruhan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, kebijakan PMT tidak hanya dianggap sebagai respons efektif terhadap masalah gizi, terutama selama masa sulit seperti pandemi, tetapi juga sebagai solusi konkret yang memberikan dampak positif yang terukur dan mendorong perubahan positif dalam lingkungan kebijakan serta di tingkat masyarakat. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya kebijakan ini dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak-anak di tengah tantangan yang dihadapi oleh keluarga. Di sisi lain terdapat beberapa faktor yang menyebabkan program PMT menjadi gagal dikarenakan faktor lingkungan kebijakan yang

negatif. Mengeksplorasi masalah kegagalan program PMT, perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang memainkan peran kunci dalam hal ini. Salah satu faktor utama adalah faktor lingkungan kebijakan yang negatif.

*Kedua*, penyebab lingkungan negatif. Faktor-faktor lingkungan ini mencakup faktor eksternal dan internal. Permasalahan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo meliputi faktor lingkungan negatif ini juga disebabkan oleh keterbatasan dalam pemantauan dan dukungan dari pihak berwenang (dinas kesehatan). Terbatasnya tenaga kesehatan di desa dengan hanya satu bidan yang melayani banyak sasaran serta jumlah kader yang terbatas juga menciptakan kendala dalam mendukung efektivitas program ini. Pemantauan program PMT juga diakui kurang optimal. Namun, perlu digarisbawahi bahwa ketika anak-anak didampingi, dikumpulkan, dan diajak makan bersama-sama, program ini akan berjalan lebih baik. Meskipun ada beberapa kasus di mana beberapa anak tidak mau berpartisipasi, yang mengakibatkan kegagalan program ini.

Dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan negatif yang meliputi kurangnya pemahaman orangtua, keterbatasan dalam pemantauan, dan kurangnya dukungan dari pihak berwenang (dinas kesehatan), merupakan faktor-faktor kunci yang dapat menyebabkan kegagalan program PMT. Namun, melalui pendekatan yang melibatkan orangtua dan anak-anak secara aktif dalam program ini, ada potensi untuk meningkatkan efektivitasnya meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.

### **Penanggulangan Stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo melalui Program PMT dari Perspektif Kepatuhan Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran menjadi elemen vital dalam perancangan dan implementasi kebijakan, berperan sebagai penerima utama yang menentukan efek keseluruhan kebijakan terhadap masyarakat. Pengakuan akan pentingnya kelompok sasaran menjadi landasan yang tidak dapat diabaikan, sebab keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait erat dengan pemahaman dan manajemen yang bijak terhadap dinamika kelompok tersebut. Pentingnya pengukuran keberhasilan yang akurat merupakan elemen penutup yang tak kalah penting. Melalui langkah-langkah ini, evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan cermat, dan hasilnya dapat diukur secara obyektif. Keseluruhan proses ini membentuk suatu kesatuan integral, di mana identifikasi, formulasi strategi, dan pengukuran keberhasilan saling terkait secara dinamis. Dengan demikian, pemahaman mendalam bukan hanya mengenai pentingnya kelompok sasaran, melainkan juga kemampuan untuk bijak mengelola setiap langkah-langkah tersebut, menjadi kunci utama dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam implementasi kebijakan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program perlindungan masyarakat tidak mampu melibatkan aspek psikologis dan persepsi kelompok sasaran terhadap bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Salah satu hambatan utama adalah terkait kurangnya rasa puas dan kepercayaan yang diberikan oleh kelompok sasaran terhadap program tersebut. Sebagian anggota kelompok sasaran mungkin merasakan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak mencerminkan empati yang memadai, sehingga hal ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap bantuan yang diterima (Wawancara dengan Shintya Megawati, SKM, pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo).

Untuk mengatasi kendala tersebut, penting untuk pelaksanaan PMT dengan pendekatan yang lebih holistik dan berfokus pada partisipasi aktif kelompok sasaran. Meningkatkan interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu membangun kepercayaan dan memahami kebutuhan spesifik kelompok sasaran. Selain itu, menyelenggarakan program penyuluhan dan sosialisasi yang menyentuh aspek empati dan kepedulian dapat membantu mengubah persepsi negatif menjadi dukungan positif terhadap bantuan yang disediakan. Di sisi lain, program PMT bukan hanya sebatas pada penyediaan makanan semata, melainkan telah melibatkan proses perencanaan makanan yang sangat komprehensif, melebihi sekadar mempertimbangkan kuantitasnya.

Proses ini mencakup perhitungan yang matang terkait dengan nilai gizi makanan, termasuk kalori, protein, dan unsur nutrisi lainnya. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari segi ketersediaan makanan, tetapi juga dari kualitas nutrisi yang diberikan kepada kelompok sasaran.

Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas program, pihak yang bertanggung jawab aktif bekerja sama dengan organisasi lain untuk merancang menu yang lebih seimbang dan bermanfaat secara nutrisi. Melibatkan berbagai pihak dan pakar dalam perencanaan menu menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memberikan bantuan yang lebih holistik. Pendekatan ini memastikan bahwa makanan yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar kelompok sasaran tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan status gizi mereka.

Dalam mengatasi ketidakpatuhan kelompok sasaran, organisasi pelaksana dihadapkan pada tugas yang kompleks dan memerlukan strategi yang matang. Bagaimana organisasi mengembangkan pendekatan yang responsif dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan kelompok sasaran menjadi pertanyaan sentral dalam dinamika implementasi kebijakan.

### **Faktor Ketidakpatuhan Kelompok Sasaran**

Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendasari ketidakpatuhan dan kemampuan untuk merancang intervensi yang relevan akan menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menyatakan bahwa pemantauan pertumbuhan anak-anak dalam konteks ini menemui sejumlah kendala signifikan yang perlu dipahami secara mendalam. Salah satu hambatan utama terletak pada kesulitan pertumbuhan anak-anak yang dipicu oleh kondisi kesulitan yang dialami oleh orang tua mereka. Kendala ekonomi yang dihadapi oleh orang tua turut mempengaruhi pertumbuhan anak-anak, menciptakan tantangan ganda yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, keterbatasan kader juga menjadi kendala, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, terungkap bahwa kepatuhan orang tua sasaran juga menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan program. Faktanya, tidak semua makanan yang didistribusikan kepada anak-anak benar-benar dikonsumsi oleh mereka. Sebaliknya, makanan tersebut justru dikonsumsi oleh anggota keluarga lainnya. Fenomena ini menandakan adanya tingkat ketidakpatuhan di beberapa kelompok sasaran, yang menciptakan catatan yang kompleks dalam pemantauan program. Hal ini menekankan pentingnya untuk tidak hanya fokus pada aspek distribusi makanan, tetapi juga memperhatikan tingkat pemahaman dan partisipasi orang tua dalam memastikan efektivitas dan keberlangsungan program secara menyeluruh. Oleh karena itu, permasalahan ketidakpatuhan ini menjadi sangat relevan dan menuntut respons yang cermat dari organisasi pelaksana.

### **Solusi Mengatasi Ketidakpatuhan Kelompok Sasaran**

Terkait ketidakpatuhan kelompok sasaran dalam konteks program PMT, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan menjadi sangat krusial. Kelompok sasaran program PMT dapat terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kendala ekonomi, kurangnya pemahaman tentang manfaat program, atau bahkan pertimbangan budaya yang memengaruhi penerimaan terhadap bantuan nutrisi.

Bagaimana organisasi menghadapi tantangan ketidakpatuhan dalam rangka memastikan efektivitas program menjadi aspek kritis yang perlu diselidiki lebih lanjut. Pentingnya koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh tim pelaksana PMT untuk memastikan efektivitas program. Dengan berkoordinasi secara aktif dengan berbagai pihak

di lapangan, termasuk petugas gizi, bidan, dan kader, tim tersebut berupaya menyampaikan manfaat PMT kepada kelompok sasaran. Komunikasi yang terjalin melibatkan berbagai *stakeholder* membantu memperkuat pemahaman keluarga tentang pentingnya PMT untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka.

Lebih lanjut, memberikan contoh konkret atau studi kasus dapat menambah kekuatan dalam menyampaikan bagaimana koordinasi dan komunikasi efektif dapat menciptakan dampak positif pada implementasi program PMT. Selanjutnya apa yang menjadi faktor utama ketidakpatuhan kelompok sasaran ini. Kondisi yang menciptakan suatu siklus yang merugikan, di mana anak-anak kehilangan selera untuk makanan pokok yang seharusnya menjadi sumber utama nutrisi mereka. Seiring waktu, kebiasaan ini dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap asupan gizi dan kesehatan anak-anak. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya memilih makanan yang bergizi bagi anak-anak. Strategi komunikasi yang tepat dan pendekatan edukatif dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan kesuksesan implementasi program PMT.

Kebiasaan memberikan snack di awal hari mempengaruhi kesiapan anak-anak untuk mengonsumsi makanan utama pada waktu berikutnya, karena mereka sudah merasa kenyang setelah makan snack. Akibatnya, dampak negatif terhadap asupan gizi dan kesehatan anak-anak menjadi semakin signifikan seiring berjalannya waktu. Dengan mengidentifikasi tantangan ini, penekanan pada perlunya upaya lebih lanjut dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya memilih makanan yang bergizi bagi anak-anak muncul sebagai solusi yang mendesak. Pendekatan komunikasi yang tepat dan pendidikan yang cermat perlu diterapkan untuk memastikan kesuksesan implementasi program PMT.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **SIMPULAN**

Program PMT di Kabupaten Probolinggo mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjawab tantangan stunting. Terjadinya kenaikan berat badan dan peningkatan tinggi badan pada penerima PMT menandakan keberhasilan program tersebut dalam meningkatkan status gizi anak-anak di Kabupaten Probolinggo. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya masih kurangnya perhatian terhadap intervensi penanggulangan stunting sebelum kelahiran balita. Padahal hal ini merupakan langkah yang esensial dalam upaya meningkatkan kesehatan dan perkembangan anak.

Upaya pencegahan yang lebih masif sebelum balita lahir memainkan peran krusial dalam menangani masalah stunting. Melalui penekanan pada aspek-aspek kesehatan ibu, nutrisi selama kehamilan, serta perawatan pranatal yang lebih intensif, kita dapat secara signifikan mengurangi risiko stunting pada masa anak-anak. Pemahaman mendalam terhadap determinan stunting yang berkaitan dengan masa pra-kelahiran, seperti kesehatan ibu dan nutrisi selama kehamilan, memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan intervensi yang tepat dan tepat waktu. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih proaktif dan masif dalam menerapkan intervensi sebelum kelahiran menjadi suatu keharusan untuk mencapai dampak yang maksimal dalam menanggulangi stunting dan memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi anak-anak sejak awal kehidupan.

## REKOMENDASI

Dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan stunting melalui program PMT di Kabupaten Probolinggo, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan. Peningkatan koordinasi antar sektor atau dinas terkait merupakan langkah penting dalam memastikan keselarasan program, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pemetaan sasaran yang tepat. Kolaborasi yang kuat antara sektor pendidikan juga diperlukan untuk mengadakan program edukasi gizi di lingkungan sekolah dan pusat pendidikan anak usia dini. Selain itu, juga perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak perlu diintensifkan melalui sosialisasi dan kampanye inovatif seperti pertunjukan teater, kompetisi memasak sehat, dan webinar edukasi gizi.

Dengan mengadopsi pendekatan inovatif dan berkelanjutan ini, diharapkan dapat menciptakan momentum baru dalam penanggulangan stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan sumber daya organisasi pelaksana serta pemantauan yang lebih akurat terhadap data juga perlu diperhatikan sebagai dasar strategis dalam meningkatkan efektivitas program PMT dan keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan stunting secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhamad Nur, Endah Tri Anomsari, Alikha Novira, and Sri Sudartini. 2023. "Collaborative Governance in a Mandated Setting: Shifting Collaboration in Stunting Interventions at Local Level." *Development Studies Research* 10 (1): 2212868. <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>.
- Ali, Amanat. 2021. "Current Status of Malnutrition and Stunting in Pakistani Children: What Needs to Be Done?" *Journal of the American College of Nutrition* 40 (2): 180–92. <https://doi.org/10.1080/07315724.2020.1750504>.
- Bloomfield, Jon, and Fred Steward. 2020. "The Politics of the Green New Deal." *The Political Quarterly* 91 (4): 770–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-923X.12917>.
- Dhami, Mansi Vijaybhai, Felix Akpojene Ogbo, Uchechukwu L Osuagwu, Zino Ugboma, and Kingsley E Agho. 2019. "Stunting and Severe Stunting among Infants in India: The Role of Delayed Introduction of Complementary Foods and Community and Household Factors." *Global Health Action* 12 (1): 1638020. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1638020>.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. 2023. "Dokumen Rapat Konsultasi Teknik Bidang Kesehatan Masyarakat."
- DuPuis, E Melanie, and Miriam Greenberg. 2019. "The Right to the Resilient City: Progressive Politics and the Green Growth Machine in New York City." *Journal of Environmental Studies and Sciences* 9 (3): 352–63. <https://doi.org/10.1007/s13412-019-0538-5>.
- Ginting, Sadar, Nithra Kitreerawutiwong, and Sunsanee Mekrungrongwong. 2023. "Factors Correlated with Child Undernutrition in Rural Communities Affected by Sinabung Eruptions in Indonesia." *Ecology of Food and Nutrition* 62 (5–6): 269–85. <https://doi.org/10.1080/03670244.2023.2258794>.
- Hartarto, Romi Bhakti, Akhmad Akbar Susanto, Muhammad Rizkan, Ibnu Hajar, Lulu Safira, and Embarika Mostafa. 2023. "Conditional Cash Transfer and Stunting Prevention: Evidence from Bima, West Nusa Tenggara." *Cogent Social Sciences* 9 (2): 2260607. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2260607>.
- Herbert, Alexander. 2024. "Protesting Destruction in Chapaevsk: Green Politics in a Late Soviet City" *Europe-Asia Studies*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/09668136.2024.2322441>.
- Indriyati, Liestiana, Juhairiyah, Budi Hairani, and Deni Fakhrihal. 2020. "Gambaran Kasus Stunting pada 10 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 15 (1): 77–90. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.57>.

- Kemendes. 2020. "Mengenal Lebih Jauh Tentang Stunting." Kemendes RI. 2020.
- Kemendes, RI. 2021. "Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten/Kota Tahun 2021." *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Khan, Jahidur Rahman, Md. Belal Hossain, and Nabil Awan. 2022. "Community-Level Environmental Characteristics Predictive of Childhood Stunting in Bangladesh - a Study Based on the Repeated Cross-Sectional Surveys." *International Journal of Environmental Health Research* 32 (3): 473–86. <https://doi.org/10.1080/09603123.2020.1777947>.
- Latifa, Suhada Nisa. 2018. "Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 13 (2): 173–79.
- Magnusdottir, Gunnhildur Lily. 2023. "Icelandic Climate Politics: Ways Forward to a Green and Socially Inclusive Welfare State? BT - Climate Change and the Future of Europe: Views from the Capitals." In *Climate Change and the Future of Europe. The Future of Europe.*, edited by Michael Kaeding, Johannes Pollak, and Paul Schmidt, 139–42. Cham: Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-23328-9\\_31](https://doi.org/10.1007/978-3-031-23328-9_31).
- Maliani, Latifa Suhada Nisa, Dewi Siska, and Sajiman. 2021. "Kajian Penanggulangan Gizi Buruk di Kalimantan Selatan." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 16 (2): 237–51. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i2.223>.
- Marais, Lochner, Antonie Pool, Frances Gbadegesin, Jan Cloete, and Michael Pienaar. n.d. "Child Stunting in South Africa: Urban Premium or Penalty?" *Journal of Urban Affairs*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/07352166.2022.2117627>.
- Mediani, Henny Suzana, Sri Hendrawati, Tuti Pahria, Ati Surya Mediawati, and Mira Suryani. 2022. "Factors Affecting the Knowledge and Motivation of Health Cadres in Stunting Prevention Among Children in Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Healthcare* 15: 1069–82. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S356736>.
- Minh Do, Loan, Lauren Lissner, and Henry Ascher. 2018. "Overweight, Stunting, and Concurrent Overweight and Stunting Observed over 3 Years in Vietnamese Children." *Global Health Action* 11 (1): 1517932. <https://doi.org/10.1080/16549716.2018.1517932>.
- Mugode, Raider H., Thandi Puoane, Charles Michelo, and Nelia P. Steyn. 2018. "'Feeding a Child Slowly': A Responsive Feeding Behavior Component Likely to Reduce Stunting: Population-Based Observations from Rural Zambia." *Journal of Hunger and Environmental Nutrition* 13 (4): 455–69. <https://doi.org/10.1080/19320248.2017.1403409>.
- Muhartini, T. 2017. "Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Kawasan Perbatasan di Kabupaten Bengkayang ...."
- Nirmalasari, Nur Oktia. 2020. "Stunting Pada Anak : Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia." *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 14 (1): 19–28. <https://doi.org/10.20414/Qawwam.v14i1.2372>.
- Normasia, Mahsyar, and Sudarmi. 2020. "Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Enrekang." 1 (3): 12–26.
- Nur Azizah, Nastia, Anwar Sadat. 2022. "Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Buton Selatan." *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 2 (12): 4145–52.
- Pellizzoni, Luigi. 2021. "Reconfiguring Non-Domination: Green Politics from Pre-emption to Inoperosity." *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 24 (5): 743–60. <https://doi.org/10.1080/13698230.2019.1698149>.
- Permatasari, Ane, and Bhakti Gusti Walinegoro. 2023. "Pembentukan Posyandu Remaja Sebagai Upaya Memperkuat Penanggulangan Stunting." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7 (3): 1–6.

- Probohastuti, N, and F Rengga. 2019. "Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Penurunan Stunting di Kabupaten Blora." *Jurnal Administrasi Publik FISIPUNDIP*, 1–16.
- Rachmawati, Desi, Asep Nurjaman, and Iradhad Taqwa Sihidi. 2022. "Implementation of E-Voting in the Village Head Election ( Pilkades ) Selotinatah , Ngariboyo District , Magetan Regency." *Journal of Public Policy* 8 (1): 23–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jpp.v8i1.3812>.
- Rana, Nosheen. 2023. "Why Islamists Go Green: Politics, Religion and the Environment." *Politics, Religion & Ideology* 24 (4): 629–31. <https://doi.org/10.1080/21567689.2023.2269716>.
- Ruel-Bergeron, J C, K M Hurley, Y Kang, N Aburto, A Farhikhtah, A Dinucci, L Molinas, et al. 2019. "Monitoring and Evaluation Design of Malawi's Right Foods at the Right Time Nutrition Program." *Evaluation and Program Planning* 73: 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2018.11.001>.
- Scarpello, Fabio. 2020. "Susi Versus the Rest: The Political Economy of the Fisheries Industry in Indonesia during Jokowi's First Term." *Asian Journal of Political Science* 28 (2): 122–41. <https://doi.org/10.1080/02185377.2020.1774908>.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tnp2kRI. 2017. "100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)." *Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia*.
- Tomsa, Dirk, and Narissa Bax. 2023. "Democratic Regression and Environmental Politics in Indonesia." *Asian Studies Review* 47 (4): 740–60. <https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2189690>.
- Utami, Arini Wahyu, and Lori A Cramer. 2020. "Political, Social, and Human Capital in the Face of Climate Change: Case of Rural Indonesia." *Community Development* 51 (5): 556–74. <https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1804956>.
- Waldman, Devra. 2022. "Aiming for The 'Green': (Post) Colonial and Aesthetic Politics in the Design of a Purified Gated Environment." *International Journal of Urban and Regional Research* 46 (2): 235–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1468-2427.13077>.

